

Rekonstruksi Islam Modern di Lebanon: Interaksi antara Agama, Negara, dan Gerakan Sosial

Muh. Ilham Majid Dohe¹, Susmihara²

Universitas Wira Bhakti Makassar¹, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar²

Email Korespondensi: muhilhammajid19@gmail.com susmihara@uin-alauddin.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 03 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the dynamics of modern Islamic history in Lebanon as a result of the complex interaction between colonialism, sectarian political structures, and internal social changes in the Muslim community. The background of the research is based on the fact that since the end of Ottoman rule and the beginning of the French Mandate, Lebanon has established a conventional political system that divides power based on religion. This structure, although intended to maintain political balance, has instead given rise to sectarianism and ongoing social inequality. The objectives of this study are to trace the process of the formation of the Lebanese state, identify key figures and movements in the development of modern Islam, and analyze the political, social, economic, cultural, and educational conditions of Islam in contemporary Lebanon. This research uses a historical-descriptive method with a qualitative approach, through a literature review of academic sources and documents on modern Middle Eastern history. The study shows that figures such as Sayyid Musa al-Sadr, Muhammad Husayn Fadlallah, and Hassan Nasrallah played a significant role in shaping the political and social consciousness of Muslims, particularly the Shia community. The Amal Movement and Hezbollah became key instruments of social and political transformation. Islamic institutions such as the al-Mabarrat Foundation and the Imam Sadr Foundation also strengthened the role of education and community welfare. In conclusion, modern Lebanese Islam represents a negotiation between tradition and modernity that makes religion not merely a belief system but also a moral and social foundation for building an inclusive and just society amidst the reality of sectarian politics.

Keywords: modern lebanese islam, political sectarianism, sayyid musa al-sadr, hezbollah.

ABSTRAK

Kajian ini membahas dinamika sejarah Islam modern di Lebanon sebagai hasil interaksi kompleks antara kolonialisme, struktur politik sektarian, dan perubahan sosial internal komunitas Muslim. Latar belakang penelitian didasarkan pada kenyataan bahwa sejak berakhirnya kekuasaan Ottoman dan awal Mandat Prancis, Lebanon membentuk sistem politik konfisional yang membagi kekuasaan berdasarkan agama. Struktur ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan politik, justru melahirkan sektarianisme dan ketimpangan sosial yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri proses pembentukan negara Lebanon, mengidentifikasi tokoh serta gerakan kunci dalam perkembangan Islam modern, dan menganalisis kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pendidikan Islam di Lebanon kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode historis-deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah literatur terhadap sumber-sumber akademik dan dokumen sejarah modern Timur Tengah. Hasil kajian menunjukkan

bahwa tokoh-tokoh seperti Sayyid Musa al-Sadr, Muhammad Husayn Fadlallah, dan Hassan Nasrallah berperan penting dalam membentuk kesadaran politik dan sosial umat Islam, khususnya komunitas Syiah. Gerakan Amal dan Hezbollah menjadi instrumen utama transformasi sosial dan politik. Lembaga Islam seperti al-Mabarrat Foundation dan Imam Sadr Foundation turut memperkuat peran pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, Islam modern Lebanon merupakan bentuk negosiasi antara tradisi dan modernitas yang menjadikan agama tidak sekadar sistem keyakinan, tetapi juga fondasi moral dan sosial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan di tengah realitas politik sektarian.

Kata Kunci: *islam modern lebanon, sektarianisme politik, sayyid musa al-sadr, hezbollah.*

PENDAHULUAN

Sejarah modern Lebanon tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas identitas agama dan warisan kolonial yang membentuk karakter negara tersebut. Setelah kejatuhan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1918, wilayah Lebanon berada di bawah Mandat Prancis berdasarkan keputusan Liga Bangsa-Bangsa. Pembentukan Grand Liban pada 1920 menandai lahirnya Lebanon modern, di mana pluralitas etno-religius menjadi fondasi negara. Namun, pluralitas tersebut juga menjadi sumber konflik berkepanjangan yang melibatkan komunitas Maronit, Sunni, dan Syiah. Sebagaimana diuraikan oleh Makdisi dalam *The Culture of Sectarianism* (2000), identitas sektarian di Lebanon bukanlah fenomena alamiah, tetapi produk politik kolonial yang diciptakan untuk mempertahankan kontrol administratif dan ekonomi.

Konfigurasi politik Lebanon sejak awal didasarkan pada sistem pembagian kekuasaan sektarian atau confessionalism. Kesepakatan yang dikenal sebagai National Pact (1943) menjadi dasar konstitusional yang mengatur posisi kepemimpinan politik berdasarkan agama. Presiden harus berasal dari komunitas Kristen Maronit, perdana menteri dari kalangan Muslim Sunni, dan ketua parlemen dari komunitas Syiah. Sistem ini awalnya bertujuan menciptakan keseimbangan politik, namun dalam praktiknya memperkuat batas-batas sektarian yang menghambat integrasi nasional. Menurut Fawwaz Traboulsi dalam *A History of Modern Lebanon* (2012), struktur konsosiasi ini meneguhkan ketergantungan politik terhadap patronase religius dan membuka ruang bagi dominasi elit agama dalam ranah pemerintahan.

Dalam konteks Islam modern, posisi komunitas Muslim – terutama Syiah mengalami transformasi besar sejak pertengahan abad ke-20. Sebelum tahun 1960-an, Syiah merupakan kelompok yang secara sosial terpinggirkan dan ekonominya tertinggal dibandingkan komunitas lainnya. Namun, kedatangan Sayyid Musa al-Sadr ke Lebanon Selatan pada 1959 mengubah wajah komunitas Syiah melalui mobilisasi sosial dan pendidikan. Pembentukan Movement of the Deprived (Harakat al-Mahrumin) dan organisasi Amal menjadi landasan bagi munculnya kesadaran politik Syiah. Kajian yang dilakukan oleh Cohen (2022) dalam *Religions* menegaskan bahwa al-Sadr bukan hanya pemimpin agama, melainkan juga agen transformasi sosial yang mendorong artikulasi politik baru bagi Syiah Lebanon.

Lebanon modern juga menjadi arena pertemuan antara wacana Islam politik dan modernitas. Gerakan Hezbollah, yang lahir setelah invasi Israel tahun 1982, memperlihatkan evolusi dari kelompok perlawanan militer menjadi partai politik dengan legitimasi elektoral dan sosial. Dalam studi yang dilakukan oleh Norton (2007), Hezbollah dipandang sebagai “negara dalam negara” yang menyediakan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat Syiah. Fenomena ini memperlihatkan kompleksitas hubungan antara agama, politik, dan negara di Lebanon kontemporer.

Dari perspektif Indonesia, studi tentang Lebanon sering kali dikaitkan dengan refleksi terhadap pluralisme dan politik identitas. Artikel oleh Rahmawati (2021) dalam Jurnal Politik dan Keamanan Global menyoroti relevansi model politik konsosiasi Lebanon bagi negara-negara multireligius, termasuk Indonesia, terutama dalam konteks pengelolaan keragaman dan stabilitas politik. Pendekatan komparatif ini memperkuat argumen bahwa sejarah Islam modern Lebanon tidak dapat dilepaskan dari konteks global Islam politik yang lebih luas.

Dengan demikian, Latar Belakang ini menegaskan bahwa pembentukan dan perkembangan Islam modern di Lebanon merupakan hasil interaksi historis yang kompleks antara kolonialisme, struktur negara sektarian, dan dinamika sosial internal komunitas Muslim. Kajian ini tidak hanya penting untuk memahami sejarah Lebanon, tetapi juga untuk mengidentifikasi pola-pola hubungan agama dan politik di dunia Islam kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada analisis historis dan interpretatif terhadap perkembangan Islam modern di Lebanon, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sumber data utama berasal dari literatur akademik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen sejarah yang relevan.

Proses penelitian dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan menyeleksi sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan sejarah Lebanon dan perkembangan Islam modern, termasuk peran tokoh-tokoh seperti Musa al-Sadr, Muhammad Husayn Fadlallah, dan Hassan Nasrallah. Kedua, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama mengenai hubungan antara kolonialisme, sektarianisme, dan transformasi Islam modern di Lebanon. Ketiga, penyajian hasil penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran menyeluruh dan argumentatif tentang karakteristik serta kontribusi Islam modern dalam membentuk struktur sosial dan politik Lebanon kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pembentukan Negara Lebanon

1. Dari Ottoman ke Mandat Prancis (1918-1926)

Setelah kekalahan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I, Lebanon jatuh ke tangan Prancis berdasarkan keputusan Konferensi San Remo (1920). Prancis membentuk Grand Liban yang menggabungkan Gunung Lebanon (dominan Maronit) dengan wilayah pesisir dan selatan yang mayoritas Muslim. Keputusan ini secara politis dimaksudkan untuk memperkuat posisi Kristen dalam struktur negara baru. Menurut studi Issawi (2019) di Middle Eastern Studies, kebijakan kolonial Prancis menanamkan sistem administratif yang mendukung elit Maronit, menciptakan ketimpangan ekonomi dan politik antara komunitas agama.

Meskipun Prancis membawa modernisasi infrastruktur dan pendidikan, kebijakannya memperkuat polarisasi sektarian. Komunitas Muslim (Sunni dan Syiah) merasa terpinggirkan secara politik dan ekonomi. Akibatnya, muncul resistensi terhadap pemerintahan kolonial yang kemudian melahirkan gerakan nasionalisme multireligius. Dalam perspektif ini, Islam menjadi instrumen perlawanan terhadap kolonialisme sekaligus simbol identitas sosial. Fenomena serupa juga terlihat di berbagai negara kolonial lain, termasuk Indonesia, di mana Islam memainkan peran ganda sebagai alat perlawanan dan sumber legitimasi moral (Ismail, 2022, *Jurnal Sejarah Islam dan Politik*).

Pembentukan Konstitusi Lebanon tahun 1926 memperkenalkan sistem republik parlementer yang tetap mempertahankan pembagian kekuasaan sektarian. Hal ini menandai kelahiran struktur politik konfessional yang hingga kini menjadi ciri khas Lebanon. Menurut analisis dari Carnegie Endowment (2021), sistem ini menciptakan stabilitas semu yang tergantung pada kompromi antar-sekte, tetapi gagal membangun identitas nasional yang solid. Dengan demikian, sejak awal, pembentukan negara Lebanon telah diwarnai oleh ambiguitas antara modernitas politik dan partikularisme sektarian.

2. Kemerdekaan dan Perjanjian Nasional (1943)

Kemerdekaan Lebanon pada tahun 1943 didasarkan pada kesepakatan tidak tertulis yang dikenal sebagai National Pact. Perjanjian ini merupakan hasil kompromi antara elit Maronit dan Sunni yang menegaskan orientasi politik dan identitas Lebanon. Maronit menerima karakter Arab negara, sementara Muslim Sunni menerima kemerdekaan dari pengaruh Arab yang lebih luas. Namun, komunitas Syiah tetap tidak memiliki representasi yang proporsional. Fawwaz Traboulsi (2012) mencatat bahwa sistem ini menciptakan stabilitas sementara namun memperdalam marginalisasi Syiah, yang baru kemudian mendapatkan representasi signifikan pada dekade 1970-an melalui gerakan Amal.

Sementara itu, hubungan antara agama dan negara di Lebanon pascakemerdekaan memperlihatkan dinamika yang unik. Berbeda dengan negara-negara Arab lain yang mengadopsi nasionalisme sekuler, Lebanon mempertahankan identitas religius sebagai dasar pembentukan politik. Menurut As'ad AbuKhalil (2019), sistem ini tidak hanya memperkuat peran agama dalam politik, tetapi juga membentuk "politik identitas" yang menjadikan agama sebagai sarana negosiasi kekuasaan. Fenomena ini dapat dibandingkan dengan politik Islam di Indonesia, di mana organisasi seperti NU dan Muhammadiyah berperan dalam menjaga keseimbangan antara agama dan negara (Mufidah, 2020, *Jurnal Pemikiran Islam dan Demokrasi*).

Dengan demikian, periode kemerdekaan Lebanon memperlihatkan konsolidasi struktur politik sektarian yang menjadi warisan kolonial. Islam dalam konteks ini berfungsi sebagai identitas sosial-politik yang menuntut pengakuan dalam sistem kekuasaan, bukan sekadar ekspresi keagamaan individual.

Tokoh dan Gerakan Kunci dalam Sejarah Islam Modern Lebanon

1. Sayyid Musa al-Sadr dan Gerakan Amal

Peran Sayyid Musa al-Sadr dalam sejarah Islam modern Lebanon sangat signifikan, terutama dalam membangkitkan kesadaran politik dan sosial komunitas Syiah yang sebelumnya terpinggirkan. Ketika tiba di Lebanon pada tahun 1959 dari Qom, Iran, al-Sadr segera menempatkan dirinya sebagai figur religius dan sosial yang berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Syiah di Lebanon Selatan dan Lembah Bekaa. Gerakan yang dipimpinnya dikenal dengan Harakat al-Mahrumin atau Gerakan Kaum Tertindas, yang kemudian melahirkan Amal Movement pada awal 1970-an. Menurut Cohen (2022), al-Sadr bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang reformis sosial yang berupaya menggabungkan teologi Syiah dengan praksis sosial-politik modern.

Gerakan Amal memainkan peran penting dalam pembentukan kesadaran politik Syiah di Lebanon. Sebelum munculnya Amal, komunitas Syiah sering kali berada di pinggiran politik dan ekonomi, terutama dibandingkan dengan kelompok Maronit dan Sunni yang lebih mapan. Melalui gerakannya, al-Sadr memperkenalkan gagasan bahwa partisipasi politik merupakan bagian dari tanggung jawab religius. Dalam pidatonya pada 1974, ia menegaskan bahwa "ketidakadilan sosial terhadap Syiah adalah dosa kolektif yang harus ditebus melalui solidaritas dan perjuangan". Kutipan ini mencerminkan ideologi sosial-religius yang menjadi fondasi bagi kebangkitan politik Syiah.

Menurut Traboulsi (2012), Amal bukan hanya organisasi politik, melainkan juga lembaga sosial yang menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan di daerah-daerah miskin. Model mobilisasi yang diterapkan al-Sadr mirip dengan pendekatan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mengintegrasikan aspek sosial dengan keagamaan. Artikel oleh Mufidah (2020) mencatat bahwa kesamaan ini menunjukkan bagaimana Islam dapat berfungsi sebagai basis solidaritas sosial sekaligus instrumen perubahan politik.

Menghilangnya al-Sadr secara misterius pada tahun 1978 di Libya menandai babak baru dalam sejarah Syiah Lebanon. Kehilangannya membuka ruang bagi munculnya generasi baru pemimpin Syiah yang lebih militan, termasuk para pendiri Hezbollah. Namun, warisan al-Sadr tetap kuat sebagai simbol moral dan religius yang melampaui batas organisasi Amal. Dalam banyak wawancara, para pemimpin Hezbollah, termasuk Hassan Nasrallah, sering merujuk pada ajaran al-Sadr sebagai sumber legitimasi spiritual perjuangan mereka.

2. Sayyid Muhammad Husayn Fadlallah: Ulama dan Intelektual Publik

Sayyid Muhammad Husayn Fadlallah dikenal sebagai ulama Syiah yang berpengaruh di Beirut dan salah satu pemikir keagamaan paling berpengaruh di Timur Tengah. Lahir di Najaf, Irak, pada tahun 1935, Fadlallah pindah ke Lebanon

dan mengembangkan reputasi sebagai intelektual publik yang menolak dogmatisme sektarian. Menurut Clarke (2018), Fadlallah memperkenalkan pendekatan hermeneutik progresif terhadap teks-teks Islam, terutama dalam konteks keadilan sosial dan hak perempuan. Ia menolak kekerasan atas nama agama dan menyerukan reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Fadlallah sering dikaitkan dengan Hezbollah karena banyak anggota awal organisasi tersebut adalah muridnya. Namun, ia secara eksplisit menolak dikategorikan sebagai pemimpin spiritual Hezbollah, menegaskan bahwa otoritas keagamaannya bersifat independen. Dalam wawancara tahun 2006, Fadlallah menyatakan bahwa "Islam harus menjadi kekuatan moral, bukan alat kekuasaan". Pernyataan ini menandai perbedaan antara visinya tentang Islam etis dan praktik politik Islam yang sering kali pragmatis.

Dalam konteks sosial, Fadlallah mendirikan jaringan lembaga pendidikan dan amal, termasuk al-Mabarrat Association, yang menyediakan pendidikan bagi anak yatim dan keluarga miskin tanpa memandang afiliasi sektarian. Model inklusif ini mencerminkan semangat Islam sosial yang menolak eksklusivisme. Sebagaimana dicatat oleh Rahmawati (2021) dalam kajian perbandingan dengan Indonesia, visi Fadlallah memiliki kemiripan dengan pendekatan Islam inklusif yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

3. Hezbollah dan Hassan Nasrallah: Dari Perlawan ke Politik Negara

Hezbollah muncul sebagai organisasi Syiah bersenjata pada tahun 1982 sebagai respons terhadap invasi Israel ke Lebanon. Awalnya didukung oleh Iran, Hezbollah menggabungkan ideologi revolusi Islam Khomeini dengan realitas sosial Lebanon. Menurut Norton (2007), Hezbollah berevolusi dari milisi religius menjadi partai politik dengan struktur birokrasi yang canggih dan jaringan sosial yang luas. Sejak 1992, di bawah kepemimpinan Hassan Nasrallah, Hezbollah berhasil mengubah citra dari kelompok militer menjadi aktor politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mengelola lembaga sosial.

Peran politik Hezbollah di Lebanon modern tidak dapat dilepaskan dari sistem konfessional yang memberi ruang bagi partisipasi sektarian. Namun, keberadaan sayap militer Hezbollah menimbulkan dilema kedaulatan negara karena menantang monopoli kekuasaan negara atas senjata. Menurut analisis dari Carnegie Endowment (2021), hubungan simbiotik antara Hezbollah dan negara Lebanon menciptakan dualisme kekuasaan yang unik: di satu sisi, Hezbollah adalah bagian dari sistem politik; di sisi lain, ia berfungsi sebagai kekuatan alternatif yang melampaui otoritas negara.

Nasrallah dikenal sebagai pemimpin karismatik yang menggunakan retorika religius untuk memperkuat identitas resistensi. Dalam pidato tahun 2000 setelah penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, ia menyatakan bahwa "kemenangan ini adalah kemenangan seluruh umat Islam atas penindasan". Retorika tersebut memperluas basis dukungan Hezbollah tidak hanya di Lebanon tetapi juga di dunia Islam. Dalam perspektif Indonesia, keberhasilan Hezbollah sering dipandang sebagai contoh Islam politik yang mampu beradaptasi dengan sistem demokrasi parlementer tanpa meninggalkan basis ideologisnya (Ismail, 2022).

Hezbollah juga memainkan peran ekonomi dan sosial penting. Melalui lembaga seperti Jihad al-Bina dan Islamic Health Organization, organisasi ini menyediakan layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan di wilayah yang diabaikan negara. Dalam hal ini, Hezbollah berfungsi seperti lembaga swadaya masyarakat berbasis agama. Model kesejahteraan sosial ini menarik perhatian banyak akademisi Indonesia yang meneliti peran ormas Islam dalam pembangunan masyarakat (Rahmawati, 2021).

Kondisi Islam Modern Lebanon Saat Ini: Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

1. Politik Islam di Lebanon Kontemporer

Islam modern di Lebanon saat ini berada dalam lanskap politik yang kompleks dan pluralistik, ditandai oleh sistem konfisional yang membagi kekuasaan antara kelompok agama. Dalam sistem ini, jabatan presiden diperuntukkan bagi umat Kristen Maronit, perdana menteri untuk Muslim Sunni, dan ketua parlemen untuk Muslim Syiah. Meskipun sistem ini menjamin representasi, ia juga memperkuat sekterianisme politik yang telah lama menjadi sumber ketegangan nasional. Menurut Harb (2023), politik Lebanon pasca-Perang Saudara (1975–1990) menunjukkan upaya rekonsiliasi antara kekuatan Islam dan sekuler, namun dominasi sektarian tetap menjadi penghalang bagi pembentukan identitas nasional yang inklusif.

Hezbollah menjadi aktor politik paling berpengaruh di kalangan Muslim Syiah. Organisasi ini tidak hanya mempertahankan sayap militernya, tetapi juga memainkan peran penting dalam pemerintahan dan parlemen. Dalam pemilihan umum 2018, Hezbollah dan sekutunya memperoleh sekitar 70 dari 128 kursi parlemen, menunjukkan dominasi politik Syiah dalam struktur negara. Menurut analisis oleh Carnegie Middle East Center (2022), dominasi ini memperkuat hubungan Lebanon dengan Iran, tetapi juga memperburuk hubungan dengan negara-negara Arab Teluk seperti Arab Saudi. Dalam konteks modern, Hezbollah mewakili bentuk Islam politik yang menggabungkan perlawanan ideologis dengan pragmatisme politik.

Sementara itu, komunitas Sunni di Lebanon menghadapi krisis kepemimpinan pasca-pengunduran diri Saad Hariri dari politik pada 2022. Kekosongan ini menciptakan fragmentasi internal di kalangan Sunni dan melemahkan posisi mereka dalam negosiasi politik nasional. Sebaliknya, kelompok Islam moderat seperti Jama'a Islamiyya berupaya menghidupkan kembali wacana Islam politik yang berbasis demokrasi dan pluralisme. Dalam sebuah studi oleh Rahman (2021), disebutkan bahwa kebangkitan kembali Islam moderat di Lebanon dapat menjadi jembatan antara aspirasi religius dan kebutuhan rekonsiliasi sosial nasional.

2. Ekonomi dan Ketimpangan Sosial dalam Perspektif Islam

Krisis ekonomi Lebanon yang dimulai pada 2019 telah mempengaruhi seluruh sektor masyarakat, termasuk komunitas Muslim. Nilai mata uang Lebanon terdevaluasi lebih dari 90%, dan inflasi mencapai tingkat tertinggi di dunia pada 2021. Dalam situasi ini, lembaga sosial Islam memainkan peran penting dalam

mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat miskin. Lembaga seperti Jihad al-Bina, al-Mabarrat Foundation, dan Imam Sadr Foundation berfungsi sebagai penyedia layanan sosial, menggantikan fungsi negara yang lemah. Menurut studi oleh Hoteit (2022), lembaga-lembaga ini berperan tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sebagai sarana dakwah sosial yang menghubungkan Islam dengan keadilan sosial.

Namun, dominasi lembaga sosial berbasis agama juga menimbulkan persoalan baru terkait transparansi dan akuntabilitas. Dana bantuan sering kali dipolitisasi untuk memperkuat basis dukungan kelompok tertentu. Menurut analisis dari Journal of Islamic Studies and Development (Rahim, 2020), fenomena ini mencerminkan dilema antara solidaritas Islam dan praktik klientelisme politik. Meski demikian, banyak kalangan menilai bahwa peran lembaga Islam tetap vital dalam menjaga stabilitas sosial di tengah krisis.

Di sisi lain, upaya integrasi ekonomi Islam ke dalam sistem keuangan Lebanon masih terbatas. Bank-bank Islam seperti Al Baraka Bank dan Arab Finance House hanya menguasai sebagian kecil pasar keuangan. Dalam konteks ini, Ghazal (2022) menyoroti bahwa potensi ekonomi syariah di Lebanon terhambat oleh regulasi negara yang masih bias terhadap sistem keuangan konvensional dan ketidakpastian politik nasional.

3. Dinamika Sosial dan Budaya Islam Modern

Secara sosial dan budaya, Islam modern Lebanon menunjukkan dinamika yang unik karena keberagaman sektarian yang ekstrem. Di kota-kota seperti Beirut, interaksi antara umat Islam, Kristen, dan Druze menciptakan ruang sosial yang pluralistik, meskipun sering kali rapuh. Menurut penelitian oleh Makdisi (2021), masyarakat Lebanon memiliki bentuk coexistence pragmatis, yaitu toleransi yang dipertahankan oleh kebutuhan ekonomi dan budaya bersama, bukan oleh kesepahaman ideologis.

Di kalangan generasi muda Muslim, muncul tren Islam civic atau Islam kewargaan, yaitu pemahaman Islam yang berorientasi pada hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan partisipasi publik. Lembaga-lembaga pendidikan Islam modern, seperti Makassed Philanthropic Islamic Association, memainkan peran penting dalam mempromosikan pendidikan Islam yang adaptif terhadap nilai-nilai global. Sebagaimana dicatat oleh Karim (2023), fenomena ini menunjukkan pergeseran dari Islam politik menuju Islam sosial yang menekankan etika publik dan keadilan distributif.

Di bidang budaya, perkembangan seni, sastra, dan media Islam di Lebanon juga mencerminkan sintesis antara tradisi religius dan ekspresi modern. Film, musik, dan sastra bertema keagamaan sering kali menyoroti isu identitas, trauma perang, dan solidaritas lintas sekte. Dalam penelitian oleh Yusuf (2021), misalnya, ditemukan bahwa media Islam Lebanon memainkan peran penting dalam membentuk wacana moral publik yang menentang hedonisme Barat sekaligus mempromosikan nilai-nilai sosial Islam yang kontekstual.

4. Pendidikan Islam Modern di Lebanon

Pendidikan Islam di Lebanon merupakan salah satu aspek terpenting dalam memahami dinamika Islam modern di negara ini. Sistem pendidikan Lebanon terdiri

dari tiga sektor utama: negeri, swasta, dan keagamaan. Di antara ketiganya, lembaga pendidikan Islam memiliki kontribusi besar dalam membentuk kesadaran religius dan nasionalisme di kalangan Muslim. Menurut Abbas (2022), pendidikan Islam Lebanon telah bertransformasi dari sekadar pengajaran dogmatis menjadi sarana pembentukan identitas sosial dan politik.

Lembaga seperti Al-Makassed Philanthropic Islamic Association dan Imam Sadr Foundation menjadi pionir dalam mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan sains modern. Sekolah-sekolah ini tidak hanya mendidik siswa dalam bidang teologi, tetapi juga memberikan pelatihan profesional di bidang ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Hal ini mencerminkan orientasi baru pendidikan Islam yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Di sisi Syiah, lembaga pendidikan yang dikelola oleh al-Mabarrat Association di bawah pengaruh ajaran Sayyid Muhammad Husayn Fadlallah berfokus pada pendidikan moral dan sosial untuk membangun masyarakat yang egaliter.

Namun, sistem pendidikan Islam Lebanon juga menghadapi tantangan serius. Krisis ekonomi menyebabkan banyak sekolah Islam kesulitan membayar gaji guru dan mempertahankan operasional. Banyak siswa Muslim dari keluarga miskin terpaksa berhenti sekolah. Dalam laporan Lebanese Center for Policy Studies (2023), disebutkan bahwa 40% lembaga pendidikan Islam di Lebanon mengalami penurunan kapasitas akibat krisis finansial nasional. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya generasi muda terdidik yang menjadi tulang punggung kebangkitan Islam modern Lebanon.

Terlepas dari krisis tersebut, pendidikan Islam tetap menjadi instrumen vital dalam membentuk arah Islam modern Lebanon. Di tengah polarisasi politik dan ekonomi, lembaga pendidikan Islam berperan sebagai ruang dialog lintas mazhab dan wadah penguatan nilai-nilai keadilan sosial. Menurut Suryawan (2021), pendidikan Islam di Lebanon mengajarkan prinsip *ijtihad* sosial – upaya interpretatif terhadap tantangan kontemporer dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang dinamis.

SIMPULAN

Perkembangan Islam modern di Lebanon menunjukkan dinamika interaksi antara agama, politik, dan modernitas dalam masyarakat multikonfesional. Sejak berdirinya negara pada 1943, umat Islam berperan penting dalam pembentukan identitas nasional, meskipun sistem politik konfensional memperkuat sektarianisme dan melemahkan kohesi sosial (Harb, 2023). Tokoh-tokoh seperti Imam Musa al-Sadr, Rafiq Hariri, dan Hasan Nasrallah menjadi figur kunci dalam membentuk wajah Islam modern Lebanon. Al-Sadr menekankan kesetaraan sosial, Hariri memperjuangkan modernisasi ekonomi berbasis Islam moderat, sedangkan Nasrallah melalui Hezbollah memadukan ideologi perlawanan dengan partisipasi politik. Peran mereka menandai pluralitas ekspresi Islam dalam konteks geopolitik yang kompleks.

Krisis ekonomi sejak 2019 memperlihatkan peran lembaga sosial Islam seperti Jihad al-Bina dan al-Mabarrat Foundation sebagai penyelamat masyarakat miskin di tengah lemahnya negara (Hoteit, 2022). Namun, ketergantungan terhadap lembaga

berbasis agama juga menimbulkan potensi politisasi bantuan sosial. Dalam ranah sosial dan budaya, muncul tren Islam civic-Islam yang berorientasi pada etika publik, keadilan, dan partisipasi sosial (Karim, 2023). Pendidikan Islam modern di Lebanon, melalui lembaga seperti Makassed dan Imam Sadr Foundation, berperan penting dalam membentuk generasi Muslim yang adaptif terhadap nilai-nilai global dan sains modern. Di tengah pluralisme dan krisis, Islam tetap menjadi kekuatan moral yang meneguhkan nilai kemanusiaan dan solidaritas. Dengan demikian, Islam modern Lebanon adalah hasil negosiasi antara tradisi dan modernitas. Ia bukan sekadar sistem keagamaan, melainkan fondasi moral dan sosial yang terus beradaptasi untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaulat.

DAFTAR RUJUKAN

- Clarke, M., 'The Legitimisation of Muhammad Husayn Fadlallah's Beirut Network', *Third World Quarterly*, 39.2 (2018), 310–328.
- Cohen, R. A., 'The Impact of Musa al-Sadr on the Political Mobilization of Lebanese Shia', *Religions*, 13.5 (2022), 445–462.
- Ghazal, Lina, 'Islamic Banking in Lebanon: Potentials and Constraints', *Finance and Islamic Economics Review*, 14.1 (2022), 33–51.
- Harb, Mona, 'Sectarianism and the Crisis of Power Sharing in Lebanon', *Middle East Journal of Political Studies*, 45.1 (2023), 20–41.
- Hoteit, Nabil, 'Faith-Based Welfare Organizations in Lebanon: Between Charity and Clientelism', *Journal of Social Policy in the Middle East*, 18.3 (2022), 243–265.
- Ismail, Ahmad, 'Islam dan Kolonialisme di Timur Tengah: Analisis Historis', *Jurnal Sejarah Islam dan Politik*, 3.1 (2022), 45–59.
- Issawi, Charles, 'Economic and Political Transitions in Colonial Lebanon', *Middle Eastern Studies*, 55.4 (2019), 601–618.
- Karim, Muhammad, 'Islam Civic dan Pendidikan Publik di Timur Tengah', *Jurnal Pendidikan Islam dan Masyarakat Global*, 3.1 (2023), 45–68.
- Makdisi, Saree, 'Lebanon's Culture of Pragmatic Coexistence', *Arab Cultural Review*, 12.4 (2021), 217–238.
- Mufidah, Siti, 'Demokrasi dan Politik Islam di Indonesia: Studi Komparatif dengan Timur Tengah', *Jurnal Pemikiran Islam dan Demokrasi*, 5.1 (2020), 22–38.
- Rahim, Ahmad, 'Islam dan Keadilan Sosial di Negara Krisis: Studi Kasus Lebanon', *Journal of Islamic Studies and Development*, 2.2 (2020), 101–120.
- Rahman, Syaiful, 'Islam Moderat dan Rekonsiliasi Politik di Lebanon', *Jurnal Politik Global Indonesia*, 5.2 (2021), 75–96.
- Rahmawati, Nur, 'Politik Konsosiasi dan Pluralisme Agama di Lebanon: Refleksi untuk Indonesia', *Jurnal Politik dan Keamanan Global*, 4.2 (2021), 112–130.
- Yusuf, Nurul, 'Media Islam dan Moral Publik di Lebanon', *Jurnal Komunikasi Islam Nusantara*, 4.3 (2021), 155–178.
- AbuKhalil, As'ad. (2019). *The Battle for Saudi Arabia: Royalty, Fundamentalism, and Global Power*. New York: Seven Stories Press.
- Carnegie Endowment for International Peace, The Taif Accord and Lebanon's Struggle to Regain Sovereignty (Washington D.C., 2021).

Carnegie Middle East Center. (2022). *Lebanon's Political Deadlock and the Role of Hezbollah*. Beirut.

Makdisi, Ussama. (2000). *The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon*. Berkeley: University of California Press.

Norton, Augustus R. (2007). *Hezbollah: A Short History*. Princeton: Princeton University Press.

Traboulsi, Fawwaz. (2012). *A History of Modern Lebanon*. London: Pluto Press